

## STRATEGI BERTAHAN DAN AKTIVITAS PENDIDIKAN ISLAM DI KAWASAN MINORITAS

*Ro'fah & Eva Latipah*

Ulama dan tokoh agama memainkan peran sentral dalam menegosiasikan posisi Muslim berhadapan dengan non-Muslim di daerah di mana Muslim merupakan minoritas. Sebagai representasi warga Muslim, ulama merupakan ujung tombak relasi Muslim dengan kelompok mayoritas. Mereka berperan menyuarakan aspirasi dan memastikan kepentingan Muslim diakomodasi. Secara internal, bagi Muslim sendiri ulama memainkan peran sebagai pendidik yang membentuk pemahaman, pola pemikiran serta ekspresi identitas keagamaan Muslim. Dalam konteks negara-bangsa yang menjadi fokus penelitian ini, argumen utama yang kami bangun dalam bab ini adalah penerimaan ulama terhadap negara-bangsa dan berbagai dimensinya yang cukup tinggi di daerah-daerah ini harus dilihat sebagai 'strategi survival' untuk menjamin eksistensi mereka sebagai minoritas. Ulama ingin menunjukkan bahwa Muslim adalah warga negara dan warga kota yang baik, bahkan menjadi pemain penting dalam proses pembangunan kebangsaan pada wilayah lokal dan nasional. Dalam upaya ini, ulama dan Muslim di wilayah minoritas melakukan berbagai langkah negosiasi untuk menyeimbangkan antara kebutuhan mengekspresikan identitas Muslimnya di satu sisi, dan tetap menjadi warga yang baik di sisi yang lain.

Bab ini didasarkan pada data penelitian mengenai “Persepsi Ulama Tentang Negara-Bangsa”, khususnya dari empat kota di Timur Indonesia yaitu: Kupang, Denpasar, Ambon dan Manado. Empat kota ini merupakan representasi daerah di mana Islam dianggap sebagai minoritas, atau dalam kasus Ambon, karena sejarahnya, “diminoritaskan” (Noor 2019). Membaca dinamika keagamaan (Islam) di daerah-daerah ini tentu saja tidak bisa dilepaskan dari relasi Muslim dan non Muslim sebagai kelompok mayoritas; Protestan di Ambon, Kupang dan Manado, serta Hindu di Denpasar. Meski perkembangan terbaru menunjukkan peningkatan jumlah Muslim di daerah-daerah tersebut, namun secara kultural dan politik Muslim masih memosisikan dirinya sebagai minoritas.

### **PERUBAHAN DEMOGRAFI MUSLIM**

Sebagian besar literatur berargumen bahwa Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-13 melalui pedagang dari Gujarat, India, meski para ilmuwan bersikukuh mempertahankan teori Arab dan Persia (Azra 2006). Dominasi Islam di Indonesia terjadi pada akhir abad ke-15 dengan dibentuknya 20 kerajaan Islam. Kristen Katolik dibawa masuk ke Indonesia oleh bangsa Portugis, khususnya di pulau Flores dan Timor (Boelaars 2005). Kristen Protestan diperkenalkan oleh bangsa Belanda pada abad ke-16 Masehi. Wilayah penganut animisme di wilayah Indonesia bagian Timur dan bagian lain merupakan tujuan utama orang-orang Belanda, termasuk Maluku, Nusa Tenggara, Papua, dan Kalimantan. Kristen menyebar melalui pelabuhan pantai Borneo. Kaum misionaris tiba di Toraja, Sulawesi. Wilayah Sumatera juga menjadi target para misionaris, khususnya orang-orang Batak (Goh 2005).

Agama di Indonesia memegang peranan penting dalam kehidupan masyarakat. Ini dinyatakan dalam ideologi bangsa Indonesia, Pancasila, dalam sila pertama yakni ‘Ketuhanan Yang Maha Esa’ yang merupakan hasil dari kompromi antara gagasan negara Islam dengan negara sekuler. Sejumlah agama secara kolektif berpengaruh terhadap berbagai bidang seperti politik,

ekonomi, budaya, bahkan pendidikan (Intan 2006; Hosen 2005; Seo 2013). Hingga saat ini terdapat 6 agama yang diakui di Indonesia berdasarkan Penjelasan atas Penetapan Presiden No. 1 Tahun 1965 Tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama pasal 1', yakni Islam, Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu (Marshall 2018; Shah 2017).

Menurut hasil sensus penduduk Indonesia 2010 sebanyak 87,18 persen dari 237.641.326 jiwa penduduk Indonesia adalah pemeluk Islam (Gross 2016), Protestan 6,96 persen, Katolik 2,9 persen, Hindu 1,69 persen, Buddha 0,72 persen, Konghucu 0,05 persen, dan 0,13 persen agama lainnya, serta 0,38 persen tidak menjawab atau tidak ditanyakan. Berdasar data ini nyata bahwa Indonesia merupakan negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia (Shah 2017). Sebagian besar umat Islam di Indonesia berada di wilayah Indonesia bagian Barat seperti di Pulau Sumatera, Jawa, Madura, dan Kalimantan. Untuk wilayah Timur, penduduk Muslim banyak yang menetap di wilayah Sulawesi, Nusa Tenggara Barat, dan Maluku Utara. Meski demikian, Muslim di wilayah Timur bukanlah mayoritas, melainkan minoritas.

Islam di Indonesia bagian Timur merupakan area riset yang sudah berkembang, namun masih mendapat perhatian yang lebih sedikit dibandingkan dengan wilayah Barat Indonesia. Beberapa wilayah Timur seperti Nusa Tenggara Timur (NTT), Papua, sebagian Makasar dan Maluku kerap dipandang sebagai kantong Kristen atau Katolik, dan Muslim menempati posisi minoritas. Tidak ada penjelasan terkait fenomena ini, namun ada beberapa catatan sejarah yang mungkin membantu. Beberapa studi menunjukkan Islam masuk ke wilayah Timur sedikit lebih lambat dibandingkan dengan area Barat Indonesia, meski —sebagaimana mengatakan— Islam datang lebih dulu atau bersamaan dengan masuknya dengan Katolik. Studi Fok (1997) dan Hueken (2008) misalnya menunjukkan bahwa misionaris Katolik merambah wilayah Timor pada 1642 melalui Flores dan kemudian pada abad ke-17 tercatat 2500 penduduk

Timor melakukan konversi ke agama ini. Abad ke-17, menurut Ardhana (2000), juga menjadi masa masuknya Islam ke wilayah NTT melalui Ternate (Maluku) dan Gowa di Sulawesi. Dengan kata lain Islam masuk ke Maluku dan Sulawesi sudah jauh lebih awal. Kerajaan Ternate misalnya menjadi kerajaan Islam pada abad 15, sementara kerajaan Goa di Makasar sudah ada sejak abad ke-14. Dari data tentang masuknya Katolik di NTT, dominasi Kristen di area ini mungkin disebabkan berhasilnya penjajah Portugis mengonversi penduduk lokal ke Katolik, sementara Islam tetap terpusat pada wilayah yang menjadi rute masuknya Islam yakni Flores, Alor dan Ende.

Dominasi agama dan budaya Hindu di Bali juga bisa ditarik sebabnya ke era kolonialisme. Menurut Suhadi (2019, 366) pemerintah Belanda yang awalnya menciptakan Bali berdasarkan imajinasi mereka sebagai pulau Hindu yang dikelilingi pulau Islam di sekitarnya. Imajinasi ini muncul karena “trauma” Belanda menghadapi berbagai gerakan Islam di Jawa dan Sumatera. Dengan kata lain Bali diposisikan Belanda sebagai oposisi terhadap Islam. Kebijakan pemerintah Belanda terus dibangun untuk mengontrol dan menjaga Bali sesuai tujuan dan imajinasi awal; bahkan sampai kini sistem pemerintahan desa adat yang sudah terbentuk tahun 1920 masih terus menyisakan pengaruhnya

Penting untuk digarisbawahi bahwa catatan statistik terbaru di empat daerah tersebut jelas menunjukkan peningkatan jumlah Muslim. Data BPS Kupang tahun 2013 misalnya mencatat penambahan jumlah Muslim sebesar 11,06 persen. Persentase ini mengantarkan Islam sebagai agama ketiga terbesar setelah Protestan dan Katolik. Kondisi serupa terjadi di Denpasar. Kantor Sensus Statistik di Bali menunjukkan bahwa pada 1972 jumlah umat Hindu mencapai 92,93 persen dari total populasi. Tidak nampak ada catatan jumlah Muslim pada data itu. Data terbaru, tahun 2010, menunjukkan prosentasi Hindu turun menjadi 83,46 persen, sementara Muslim tercatat pada angka 13,37 persen. Kondisi yang sama juga terjadi Manado.

Konon di tahun 1999 jumlah Muslim Manado berjumlah 49 persen dari total populasi, sementara 51 persennya adalah Kristen. Menariknya, data BPS tahun 2018 mencatat populasi Muslim hanya ada pada angka 37,78 persen yang menempati urutan kedua setelah Kristen yang dianut oleh 54,32 persen penduduk.

Data dari empat kota dalam tulisan ini menunjukkan penambahan jumlah Muslim lebih disebabkan karena faktor migrasi, bukan karena konversi. Bali, Manado, Kupang dan Ambon merupakan area urban yang menarik pendatang dari berbagai daerah, dan mayoritas pendatang adalah Muslim. Tetapi tentu saja faktor konversi tidak sepenuhnya hilang. Meski dalam skala kecil, konversi masih menjadi salah satu penyebab peningkatan jumlah Muslim mengingat perkawinan antar agama merupakan praktik umum di wilayah minoritas baik dalam dalam sejarah penyebaran Islam dulu, ataupun dalam konteks sekarang. Di banyak kasus pernikahan agama berimbas pada konversi baik dari agama lain ke Islam, atau sebaliknya. Konsekuensi inilah yang bagi Muslim di beberapa daerah, utamanya Kupang dan Manado, menjadi isu sensitif dan kerap dikategorikan sebagai upaya Kristenisasi.

Apakah perbincangan mayoritas-minoritas selalu dikaitkan dengan kuantitas? Sosiolog Louis Wirth pada tahun 1941 menerbitkan *Morale and Minority Groups*, yang di antara argumennya adalah klasifikasi minoritas bukanlah tentang angka namun lebih karena proses *othering* atau perbedaan perlakuan yang diterima oleh mereka yang dianggap berbeda baik secara sosial maupun kultural. Perbedaan ini kemudian ditegaskan dengan hambatan partisipasi yang dialami kelompok ini. Wirth (1941) secara tegas menyatakan “*Your people could be “apart” and marginalized even if you made up 60 percent of the population*”. Fenomena yang digambarkan Wirth ini mungkin, dalam beberapa aspek, merefleksikan pengalaman Ambon. Data dari Noor (2019) menggambarkan bahwa kota Ambon sejak awal sejarahnya tidak bisa dikatakan sebagai daerah

minoritas Islam karena populasi Muslim sudah signifikan. Dalam perkembangan terkini bahkan secara perlahan Islam tampak menjadi mayoritas. Namun, Noor menegaskan adanya upaya yang dilakukan pemerintah kolonial untuk memminoritaskan Muslim melalui kebijakan polarisasi agama yang diterapkan penjajahan Portugis dan terus berlanjut pada masa Belanda. Dalam kebijakan ini preferensi pemerintah kolonial diberikan kepada kelompok Kristen, sehingga tidak mengherankan ketika penjajah Jepang datang di wilayah ini, Muslim menyambutnya dengan antusias berharap diskriminasi terhadap Muslim akan berkurang. Nyatanya yang terjadi adalah masih berlanjutnya segregasi geografis antara Muslim dan non-Muslim yang menjadi warisan kebijakan kolonial, dan berkontribusi cukup signifikan pada kerusuhan Ambon 1998. Polarisasi inilah yang kemudian menjadi fokus program rekonsiliasi Muslim Kristen pasca kerusuhan dengan menggunakan atau membangkitkan kembali tradisi lokal terutama *Pela Gandong*.

Dinamika dan mentalitas mayoritas-minoritas semakin menarik jika mendengar narasi resistensi yang disuarakan Muslim di Kupang dan Menado. Beberapa informan di Kupang menyatakan bahwa Islam adalah agama tertua di Nusa Tenggara Timur dan karenanya “kekuatan” Islam sebagai bagian dari budaya NTT tidak perlu diragukan. Beberapa dari informan bahkan menunjukkan “kecurigaannya” terhadap data statistik yang menempatkan Islam pada posisi ketiga, menganggap bahwa ini adalah politik marginalisasi. Mereka merasa jumlah Muslim sudah cukup signifikan untuk mengantarkan Islam sebagai agama terbesar kedua di NTT. Informan lain menyatakan bahwa meski Muslim adalah minoritas, namun mereka merupakan minoritas yang kuat karena sejak awal peran ekonomis dan sosial Muslim di NTT dan Kupang khususnya, cukup dominan. Statemen ini mungkin tidak tanpa alasan mengingat Muslim imigran dari Sulawesi, Jawa maupun Sumatera memegang kendali pada sektor sektor krusial seperti kebutuhan dasar. Posisi ekonomis pendatang yang kuat ini, menurut beberapa pihak, menimbulkan kecemburuan sosial



penduduk asli terhadap imigran Muslim yang menjadi salah satu faktor dibalik tragedi 30 November 1998.

Narasi Muslim Manado ternyata tidak jauh berbeda. Meski data statistik menunjukkan bahwa jumlah Muslim ada pada angka 37,78 persen, kedua setelah Kristen yang ada pada angka 51, namun sebagian Muslim Manado merasa bahwa jumlah mereka adalah 50 : 50 dibanding Kristen. Dari paparan Eva Latipah (2019) peningkatan jumlah Muslim di Manado juga disebabkan oleh migrasi terutama penetapan daerah ini sebagai Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE). Dalam 10 tahun terakhir, Manado menjadi pusat aktivitas ekonomi di Timur Indonesia sekaligus gerbang Asia Pasifik. Hal ini tentu saja mengundang imigran dari luar daerah, terutama Jawa dan Sumatera untuk turut serta bertarung dalam pasar Manado yang semakin ramai.

Perubahan demografi sebagaimana bisa dilihat di atas tentunya memberi pengaruh tidak saja terhadap kehidupan keagamaan tapi juga aspek sosial lain, termasuk relasi mayoritas-minoritas. Dari paparan di atas jelas terlihat bahwa kepercayaan diri masyarakat Muslim di wilayah-wilayah ini meningkat dan kemudian memunculkan “narasi resistensi” terhadap posisi minoritas yang selama ini mereka alami. Di antara narasi resistensi yang bisa diidentifikasi adalah, *pertama*, klaim jumlah Muslim yang tidak selalu sesuai dengan data statistik untuk menolak label minoritas, atau setidaknya yang *kedua*, identifikasi diri sebagai *powerful minority*; minoritas yang menguasai sektor-sektor penting dalam kehidupan ekonomi dan sosial.

### **RELIGIOUS SCHOLAR DAN RELIGIOUS ENTREPRENEUR DI KAWASAN MUSLIM MINORITAS**

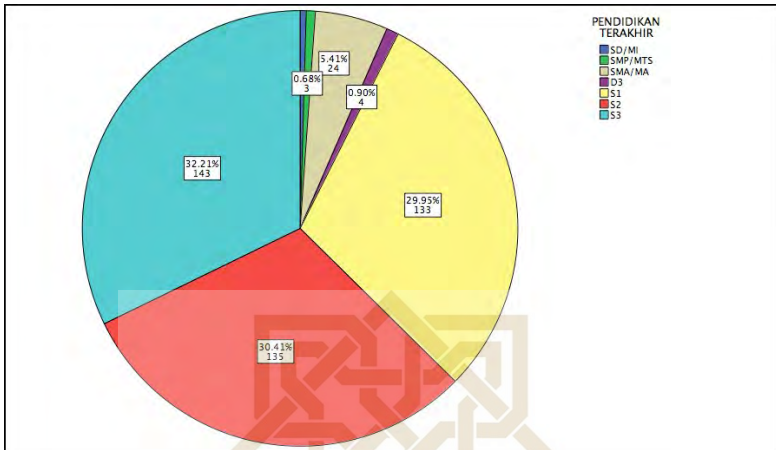
Ulama menduduki tempat yang sangat penting dalam kehidupan kaum Muslim. Dalam banyak hal, ulama dipandang menempati kedudukan dan otoritas keagamaan sebagai pewaris otoritas Nabi Muhammad (*al-‘ulamā’ waratsatu l-anbiyā’*). Karenanya ulama sangat dihormati. Pendapat-pendapat mereka dipandang

otoritatif dalam berbagai masalah, bukan hanya masalah keagamaan melainkan permasalahan bidang lainnya termasuk pendidikan. Ulama telah memainkan peran penting dalam pengembangan pendidikan Islam di Indonesia jauh sebelum terlibat dalam politik kebangsaan, melalui pendirian berbagai pesantren, dengan kitab kuning sebagai kurikulumnya (Noorhaidi 2019). Ulama dalam konteks ini adalah orang-orang yang memiliki latar belakang pendidikan agama secara formal, yakni mengkaji dan mendalami teks-teks keagamaan secara khusus baik melalui institusi pendidikan seperti Pesantren, Universitas Islam terkemuka di dunia (Al-Azhar, Ibnu Saud, Tarim Hadramaut) dan di dalam negeri (Universitas Islam Negeri/Institut Agama Islam Negeri), maupun yang mempelajari secara khusus melalui tradisi majelis taklim yang ketat. Ulama mempunyai pengetahuan dalam bidang fikih, tauhid, tasawuf, atau pendidikan Islam dan bidang keislaman lainnya. Dengan latar belakang pendidikan dan pengetahuan tersebut mereka memiliki otoritas dalam menyampaikan pesan-pesan keagamaan dan diakui oleh para jemaahnya (Suhadi & Miftah Suseno 2019). Ulama seperti ini diistilahkan sebagai *religious scholar*.

*Religious scholar* juga adalah seorang pendidik. Banyak ulama berprofesi sebagai pendidik. Mereka dikenal sebagai “ustaz”. Gelar ustaz mendahului nama yang secara historis digunakan untuk guru dan seniman yang dihormati, paling sering musisi. Ustaz juga digunakan untuk merujuk pada guru, pendidik, atau ahli. Bahkan di negara-negara berbahasa Arab, kata ustaz mengacu pada seorang profesor universitas atau dosen.

Secara keseluruhan ulama Indonesia yang menjadi responden dalam penelitian di 15 kota (Burdah, Kailani dan Ikhwan 2019) yang menjadi sumber penulisan bab ini memiliki jenjang pendidikan sebagaimana ditunjukkan pada Grafik 1.





Grafik 1. Jenjang Pendidikan Ulama Indonesia

Grafik 1 menunjukkan bahwa mayoritas ulama di 15 Kota besar di Indonesia berjenjang pendidikan Strata-3 (32,2 persen), disusul secara berturut-turut oleh ulama yang berjenjang pendidikan Strata-2 (30,4 persen), Strata-1 (29,95 persen), dan SMA (5,4 persen). Di salah satu kawasan Muslim minoritas, para ulama mayoritas berjenjang pendidikan S2 (30 persen), S1 (30 persen), dan S3 (24 persen), serta SMA (6 persen).

Jenjang pendidikan dapat memengaruhi cara berpikir, bersikap, dan berperilaku seseorang. Semakin tinggi jenjang pendidikan, semakin luas dan mendalam pengetahuan yang diperoleh. Ulama dengan jenjang pendidikan tinggi memperoleh pengetahuan dan pengalaman lebih luas dan mendalam dibanding dengan ulama yang berjenjang pendidikan lebih rendah. Dengan semakin luas dan mendalam pengetahuan dan pengalaman dalam ilmu agama, memungkinkan mereka bersikap lebih terbuka dan lebih adaptif terhadap pengetahuan dan pengalaman lain yang berbeda. Ulama lebih bisa menerima perbedaan-perbedaan paham yang ada. Meminjam istilah Allport, dalam kondisi demikian individu memiliki kematangan beragama. Terbukti bahwa ulama di Indonesia memiliki tingkat penerimaan yang tinggi (71,56 persen) terhadap konsep negara-

bangsa; bahkan tingkat penerimaan di wilayah minoritas Muslim memiliki kecenderungan lebih tinggi (26,44 persen) dibandingkan dengan kota metropolitan (22,89 persen) dan kota arus utama Muslim (22,22 persen).

Ulama dalam konteks ini juga adalah mereka yang tidak memiliki jenjang pendidikan yang ketat namun memiliki pengetahuan agama yang diperoleh melalui sumber-sumber yang tersedia dan mudah diakses, seperti buku-buku terjemahan, pengajian, dan mendengarkan serta mengikuti pengajian di media-media baru seperti televisi dan berbagai media sosial (YouTube, Whatsapp, Facebook, Vlog, dsb). Dengan demikian mereka memiliki otoritas keagamaan karena dipandang mampu mengemas pesan-pesan keagamaan secara menarik yang disampaikan kepada umat secara luas (Suhadi & Miftah Suseno 2019). Ulama seperti ini diistilahkan sebagai *religious entrepreneur*.



Grafik 2. Latar belakang Pendidikan Ulama: Pesantren dan Non-Pesantren

Dalam Grafik 2 di atas terlihat jumlah ulama yang berlatar belakang pendidikan non-pesantren lebih besar (70,22 persen) dibanding dengan ulama yang berlatar belakang pendidikan pondok pesantren (29,78 persen). Ini artinya bahwa para ulama yang terjaring sebagai subjek penelitian ini lebih banyak yang berlatar belakang pendidikan non-pesantren dibandingkan dengan yang berlatar belakang pendidikan pesantren. Ini menjadi indikasi kuat betapa perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sangat kuat memengaruhi cara penyebaran ilmu agama dan keagamaan, bahkan terhadap cara beragama umat Islam. Di salah satu kawasan Muslim minoritas, 80 persen ulama merupakan *religious entrepreneur*, sisanya (20 persen) merupakan *religious scholar*, dengan usia merentang antara 29-40 tahun sebanyak 60 persen (Latipah 2019).

Pesantren merupakan tempat di mana seseorang mempelajari tentang dasar dan inti kepercayaan Islam dan ajaran praktik ritual yang menjadi dasar dari peribadatan Islam (Dadan Muttaqin 1999). Pondok pesantren juga merupakan lembaga pendidikan dan pengajaran agama Islam yang umumnya dilakukan dengan sistem non-klasikal. Kyai mengajarkan ilmu agama Islam kepada santrinya berdasarkan kitab-kitab yang ditulis dalam bahasa Arab (Sajoko Prasojo 1982). Pesantren adalah salah satu sistem pendidikan Islam di Indonesia dengan ciri khas yang unik dan dianggap sebagai lembaga pendidikan Islam tertua (Nurun 2007). Di Indonesia, pendidikan pesantren berada di bawah tanggung jawab Kementerian Agama Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren (Kemenag 2016). Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren memiliki lingkup meliputi: jalur pendidikan formal (diniyah formal, satuan pendidikan muadalah, dan ma'had 'ali) dan non-formal (madrasah diniyah takmiliyah, pendidikan Alquran, dan program pendidikan kesetaraan serta pondok pesantren sebagai penyelenggara maupun satuan pendidikan; Tempo 2018).

Lalu dari mana para ulama ini memperoleh pengetahuan agama? Sebagaimana dikemukakan di atas bahwa mereka

memperoleh pengetahuan agama dari berbagai buku terjemahan, mengikuti dan mendengarkan pengajian di media-media baru seperti televisi dan berbagai media sosial (youtube, whatsapp, facebook, vlog, dsb). Secara tidak langsung temuan ini mengindikasikan bahwa *religious entrepreneur* lebih banyak presentasinya dibandingkan dengan *religious scholar*.

Temuan ini selaras dengan penghuni bumi mayoritas saat ini yakni generasi milenial, yaitu penduduk bumi yang terlahir mulai tahun 1980-2000. Penduduk bumi saat ini didominasi oleh generasi milenial (87 persen). *Religious entrepreneur* adalah para ulama generasi milenial yang mempunyai karakter khas yang berbeda dari generasi sebelumnya mulai dari budaya, sikap, tingkah laku, dan hal lainnya. Ini berdampak juga terhadap budaya, sikap, dan perilaku beragamanya. Hal ini terjadi karena generasi milenial hidup di zaman serba ada. Mereka tinggal menggunakan apa yang sudah ditemukan oleh generasi sebelumnya, yakni generasi X. Bagi generasi milenial, belajar agama dapat dilakukan melalui berbagai media dengan bantuan teknologi, atau lebih tepatnya menggunakan media sosial. Di era milenial, anak muda menyukai ustaz yang *digital friendly*. Oleh karenanya tidak mengherankan jika dewasa ini ustaz-ustaz milenial mempunyai lebih banyak *follower* karena mereka menggunakan media sosial sebagai ajang berdakwah.

Menjamurnya sumber belajar agama Islam berbasis teknologi ini menjadi salah satu alasan mengapa para ustaz masa kini lebih banyak meninggalkan pondok pesantren dan belajar ilmu agama dari berbagai media tersebut. Alasan mereka cukup beragam. Secara umum bahwa mereka lebih memilih belajar ilmu agama melalui dunia maya (internet) dikarenakan efisiensi. Menurut mereka internet telah menjadi sumber belajar agama yang sangat lengkap. Informasi apapun yang dibutuhkan ada dalam internet. Salah seorang ustaz di kawasan Muslim minoritas mengatakan bahwa *‘pesantren terikat kuat hanya dari segi hubungan dengan Kyai yang menjadi gudang ilmu. Kini, sumber ilmu terbuka lebar, maka akses untuk dapat ilmu*

*tidak lagi butuh Kyai. Kyai, kini lebih sebagai sumber untuk ngalap berkah'.*

### **PENERIMAAN ULAMA: STRATEGI SURVIVAL**

Sekali lagi, ulama di Indonesia memiliki tingkat penerimaan yang tinggi (71,56 persen) terhadap konsep negara-bangsa; bahkan tingkat penerimaan di wilayah minoritas Muslim memiliki kecenderungan lebih tinggi yakni 26,44 persen, dibandingkan dengan kota metropolitan (22,89 persen) dan kota arus utama Muslim (22,22 persen). Mengapa ini terjadi? Apa penjelasannya? Para ulama di wilayah minoritas memberikan alasan berbeda-beda terkait penerimaan mereka dalam berbagai dimensi kebangsaan. Namun secara umum penerimaan ini perlu dilihat sebagai upaya dan strategi *survival* ditengah budaya kelompok dominan.

Kasus Bali merefleksikan fenomena ini dengan cukup jelas. Tingginya tingkat penerimaan ulama Bali terhadap gagasan Pancasila sebagai ideologi negara, pilihan terhadap aksi non-kekerasan, kebebasan memilih agama, kebebasan beribadah, serta kebebasan berserikat merupakan strategi *survival* mereka di tengah kultur dominan dan bangkitnya politik identitas Hindu. Hal ini bisa terlihat lebih jelas pada penerimaan dan negosiasi yang dilakukan Muslim Bali terhadap revitalisasi budaya Hindu yang kini diusung melalui gerakan dan kebijakan *Ajeg Bali*, yang mendukung Bali sebagai destinasi wisata dunia. *Ajeg Bali merupakan gerakan penguatan Hindu sebagai politik identitas yang bertujuan untuk mempertahankan agama, budaya, dan bahasa Bali sekaligus menjadi benteng terhadap arus pendatang Muslim dan ekspresi identitas keislaman yang semakin mencolok.* Salah satu perwujudan Ajeg Bali adalah kewajiban bagi siswa sekolah dan pegawai pemerintah untuk menggunakan pakaian adat pada hari-hari tertentu.

Dalam praktiknya, Muslim Bali melakukan negosiasi dengan menerima kebijakan tersebut, namun pada saat yang sama memodifikasi penggunaan busana agar sesuai dengan

tuntunan Islam. Hasilnya adalah pemakaian kebaya Bali lengkap dengan kamen (bawah) namun tetap menggunakan jilbab (tutup kepala) bagi putri. Sementara itu siswa dan pegawai Muslim putra tetap memakai tutup kepala ala Bali karena tidak adanya aturan Islam yang secara melarang pemakaian penutup kepala bagi Muslim. Secara umum, Muslim Bali juga menerima konsekuensi tinggal di Bali sebagai daerah destinasi wisata dunia yang sangat terbuka. Pemerintah Bali memberikan penghormatan terhadap kebebasan bagi wisatawan sebagai salah satu pelayanan terbaik kepada wisatawan.

Di Kupang, 70 persen Ulama bersikap moderat terhadap negara-bangsa. Hasil wawancara Ro'fah (2019) dengan ulama Kupang mengidentifikasi bahwa penerimaan terjadi karena adanya kesepakatan. Kesepakatan menjadi poin penting dalam penerimaan Muslim terhadap NKRI, dengan alasan normatif bahwa Alquran tidak pernah secara tegas berbicara tentang konsep negara atau bentuk negara ideal. Identitas Muslim Kupang sebagai 'putra bangsa', yakni memiliki peran dan hak yang sama sebagai bagian dari Indonesia, menjadi alasan lain mengapa ulama Kupang menerima konsep negara-bangsa. Loyalitas kepada pemerintahan yang sah menjadi alasan lain mengapa ulama Kupang menerima negara-bangsa. Bagi mereka loyalitas terhadap pemerintahan yang sah merupakan salah satu ajaran yang mereka anut. Terkait dengan strategi *survival* yang dijelaskan sebelumnya, loyalitas terhadap pemerintahan lokal —yang mayoritasnya adalah non-Muslim— memberikan gambaran yang lebih nyata. Bagi Muslim Kupang, meski mereka menginginkan pemimpin Muslim, mereka menunjukkan penerimaan yang baik terhadap pemimpin lokal yang mayoritas adalah non-Muslim. Selama kepemimpinan non-Muslim dianggap mengakomodasi kepentingan-kepentingan Muslim maka tidak ada alasan untuk menolak mereka, apalagi, menurut para ulama lebih lanjut, kondisi real warga Muslim belum memungkinkan mereka memiliki pemimpin Muslim. Pada saat yang sama para ulama juga menafsirkan bahwa Pancasila dan UUD 1945 merupakan harga mati yang sudah



tidak bisa lagi ditawarkan dan karenanya formalisasi Syariah di Indonesia dipandang tidak penting.

Hal yang hampir sama terjadi di Ambon, di mana 97 persen ulamanya menerima negara-bangsa dengan sejumlah alasan. Kesepakatan bersama sebagai bangsa Indonesia merupakan salah satu alasannya. Bagi mereka, NKRI, Pancasila, dan UUD 1945 sudah selaras dengan ajaran Islam. *Founding Fathers* sudah sangat mempertimbangkan banyak hal ketika memilih sebuah negara demokrasi bukan negara Islam walaupun mayoritas penduduk Indonesia adalah Muslim. Dengan bentuk negara seperti saat ini, tugas sebagai Muslim dan warga negara Indonesia adalah mengisi ruang-ruang yang tercipta dalam sistem negara demokrasi ini.

Selaras dengan ulama Ambon, ulama Manado yang menerima konsep negara-bangsa sebanyak 90 persen (27 dari 30 ulama). Terhadap ideologi Pancasila, mereka menerima secara bulat tanpa syarat sebagai simbol perekat bangsa yang majemuk. Bagi mereka, Pancasila merupakan pilar kesatuan dalam keragaman dan prinsip dasar yang mempersatukan bangsa Indonesia yang majemuk. Mereka meyakini, dalam dasar dan falsafah negara ini terdapat esensi nilai-nilai keislaman. Hal yang menarik adalah bahwa argumen nasionalisme digunakan sebagai dasar dukungan terhadap Pancasila tidak semata-mata dimonopoli oleh ulama dengan basis sosial organisasi nasionalis. Ada juga ulama yang berasal dari lingkungan konservatif, yang menggunakan argumen kebangsaan dan kebhinekaan untuk mendukung Pancasila.

Terkait kepemimpinan perempuan, ulama Manado memandang bahwa kepemimpinan perempuan di ruang publik merupakan hal yang tidak perlu dipersoalkan karena ditinjau dari sudut pandang normatif-teologis sudah jelas, apalagi jika mencermati sejarah Rasulullah SAW, bagaimana Ummu Hindun memimpin perang dan Nabi mengiyakan. Pandangan ulama di Manado secara keseluruhan menunjukkan sikap yang pro-demokrasi. Demokrasi tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam, bahkan prinsip-prinsip dalam sistem demokrasi sudah

sejak lama dipraktikkan di dalam Islam. Demokrasi telah menuntun ke beberapa bentuk dan sarana, yang hingga kini dianggap sebagai satu-satunya sistem yang memberi jaminan keselamatan bagi rakyat.

### **ULAMA: OTORITAS DAN INSTITUSI PENDIDIKAN**

Pendidikan dapat menjadi indikasi kuat-lemahnya penyebaran ajaran agama Islam di sebuah wilayah. Di wilayah minoritas Muslim, pendidikan Islam bukanlah hal yang mudah diperoleh. Dibutuhkan negosiasi-negosiasi tertentu agar pendidikan Islam di wilayah minoritas dapat berkembang secara dinamis. Dinamisme pendidikan Islam di wilayah minoritas Muslim dapat dilihat dari organisasi-organisasi keagamaan yang berkembang. Perkembangan organisasi keagamaan menjadi sinyal kuat bagaimana perkembangan Islam di wilayah minoritas Muslim berlangsung. Di empat kota yang diteliti, nampak bahwa semua memiliki berbagai jenis organisasi Islam. NU dan Muhammadiyah sebagai organisasi Islam mainstream tumbuh dinamis di keempat kota itu, ditambah dengan pelbagai organisasi lain baik yang sifatnya nasional maupun lokal. Organisasi keagamaan muncul dalam rangka mengakomodasi dan mewadahi terdapatnya keanekaragaman corak berpikir, kepentingan, orientasi, dan tujuan para penganut agama Islam.

Di salah satu wilayah Muslim minoritas penyelenggaraan pendidikan Islam sama halnya dengan yang diselenggarakan di wilayah mayoritas, yakni diselenggarakan secara formal dan non-formal. Pendidikan non-formal diselenggarakan oleh sejumlah organisasi keagamaan seperti NU (Nahdlatul Ulama), Muhammadiyah, Pemuda Peduli Mesjid (PPM), Ahlul Bait Indonesia (ABI), Studi Islam Assalam (SIAM), Wahdah Islamiyah Sulut (WS), Remaja Mesjid Nurul Huda, Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia, Syarikat Islam, dan Majelis Ulama Indonesia Sulawesi Utara.

Ulama, baik sebagai *religious scholar* maupun *religious entrepreneur* berperan besar terhadap eksistensi pendidikan Islam di kawasan Muslim minoritas, baik pendidikan formal

maupun non-formal. Dalam konteks penelitian ini, pendidikan Islam juga tidak bisa dilepaskan dari perannya untuk memfasilitasi penerimaan terhadap nilai-nilai kebangsaan, khususnya pada dimensi toleransi. Dengan kata lain, pendidikan Islam diarahkan untuk membawa nilai damai melalui berbagai langkah negosiasi yang dilakukan.

Dalam kasus Denpasar sebagaimana di teliti Suhadi (2019) upaya pembangunan identitas ke-Islaman Muslim melalui pendidikan dianggap berhasil. Di lingkup kota Denpasar yang tidak terlalu besar setidaknya 4 sekolah Dasar yang menjadi bagian baik secara struktural ataupun kultural dari Jaringan Sekolah Islam Terpadu yang diyakini berafiliasi ke gerakan Tarbiyah. Keberadaan empat sekolah ini tentu saja tidak bisa dilepaskan dari gairah Muslim untuk memiliki lembaga pendidikan sendiri. Dari penuturan salah satu pengelola jelas disampaikan bahwa tujuan didirikannya sekolah Islam menawarkan sistem moral berbeda sehingga bisa memberikan tuntutan moral tepat bagi anak-anak dan remaja Muslim di Bali. Kekhawatiran akan degradasi moral dan kekacauan akhlak yang menjadi narasi dominan dikalangan pendidik dirasa lebih urgent dalam konteks Bali karena dominasi turisme. Meski sebagian guru menyadari bahwa jaringan SJIT kerap diasosiasikan dengan ajaran intoleransi dan anti Pancasila namun menurut mereka tuduhan itu tidak berdasar.

Kupang juga memiliki satu SDIT yang meski berjalan dengan baik, belum nampak memiliki pengaruh dominan dalam peta keislaman. Mantan kepala sekolah SDIT ini merupakan salah satu informan dalam penelitian ini dan menariknya masuk dalam kategori radikal karena ketidaksetujuannya dengan demokrasi dan Pancasila. Adalah madrasah Hidayatullah yang memerankan peran lebih besar menjadi identitas pendidikan Muslim, dan pengurusnya terlibat langsung sebagai pengurus MUI NTT maupun Kupang. Meski jaringan perguruan Hidayatullah kerap juga diasosiasikan ke gerakan Tarbiyah namun dalam kasus Kupang identitas itu tidak begitu nampak. Madrasah yang menjadi rumah bagi Muslim di NTT

bahkan mengkaryakan ustaz-ustaz muda dari Madura yang berbasis NU. Sama menariknya untuk mengamati universitas Muhammadiyah di Kupang yang kerap dijuluki Krismuha (Kristen Muhammadiyah) karena jumlah mahasiswanya yang seimbang antara Muslim dan non-Muslim, bahkan di beberapa fakultas didominasi oleh non Muslim. Meskipun demikian, institusi pendidikan di Kupang tetap memiliki peran sebagai pusat gerakan dan keberadaan Muslim, apalagi dalam kasus universitas Muhammadiyah, yang secara geografis terletak di daerah kantung Muslim.

Di Manado dan Ambon, ulama dalam dua kategori dan institusi pendidikan berperan sebagai fasilitator dan pembawa pesan damai, tidak saja dalam kaitannya dengan non-Muslim namun juga terkait radikalisme dan intoleransi dalam tubuh Islam sendiri. Manado sebagai salah satu kota tertoleran di Indonesia memiliki beberapa lembaga pendidikan yang menjalankan upaya deradikalisasi dengan serius. Kota ini memiliki empat pesantren besar yaitu: Pondok Pesantren Al-Khaerat, Pondok Pesantren Istiqomah, Pesantren Assalam Bailang, dan Pesantren Kombos. Pesantren kombos khususnya memiliki program deradikalisasi yang cukup terstruktur dengan pola dan strategi yang sangat jelas.

Pesantren Kombos merupakan nama lain dari Pondok Karya Pembangunan (PKP) yang didirikan secara resmi pada tanggal 21 juli 1977 pada era Suharto sebagai presiden. Pesantren ini terletak di Jalan Arie Lasut, Kombos Timur, Kecamatan Singkil, Manado, Sulawesi Utara yang mendapat persetujuan dari Gubernur Sulawesi Utara kala itu yakni Hein Victor Worang, seorang agama RI (Mukti Ali) kala itu. Di sinilah awal mula terjadinya negosiasi pusat-daerah dengan corak *mutual understanding-mutual interest* agar pesantren diberikan ruang di Manado untuk mentransmisikan pengetahuan agama dan memelihara tradisi Islam sekaligus memproduksi ulama. Di sisi lain bagi umat Kristen memberikan ruang lebih (legitimasi) agar tetap mengendalikan sistem politik lokal dengan identitas keminahasan mereka.

Keberadaan pesantren Kombos dimobilisasi untuk kepentingan kaderisasi umat Islam di Manado maupun pendatang. Targetnya adalah agar para santri menjadi aset pembangunan bangsa yang bertakwa, cakap, dinamis, dan terampil sesuai cita-cita pembangunan nasional. Awalnya pesantren ini bernama formal Lembaga Pendidikan Islam. Diberi nama demikian untuk menunjukkan simbol Islam terhadap lembaga pendidikan Islam, mengingat di Manado mayoritas beragama non-Islam. Walau demikian, proses representasi lembaga pendidikan Kombos tidak melahirkan jurang dikotomi antaragama dan etnis di Manado apalagi sampai dimanfaatkan gerakan Islam trans-nasional untuk menyeragamkan pranata kehidupan publik yang majemuk. Hal ini terindikasikan bahwa selama 41 tahun pesantren Kombos masih tetap bertahan berkat watak lokalitasnya yang inklusif dan peran serta masyarakat Muslim serta pengaruh pemimpinnya yang kharismatik yakni K.H. Rizali M. Noor.

Genealogi pesantren Kombos pada awalnya bermuara pada suasana pendidikan Islam di Jawa sebagai ‘ibukota’ Pesantren di Indonesia karena pimpinannya merupakan alumni salah satu PTKIN tertua di Indonesia yakni IAIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, Fakultas Tarbiyah. Namun di tengah perjalanan terjadi perbedaan arah terkait arena terdapat perbedaan sikap masing-masing institusi pesantren dalam memaknai dimensi nasionalisme dan religiusitas terkait sistem kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal inilah yang mendorong pimpinan Pesantren Kombos mengubah haluan dalam mengelola pesantren sebagai pendidikan Islam, dari bernaansa sistem pesantren di Jawa menjadi sistem pesantren yang disesuaikan dengan sistem kehidupan berbangsa dan bernegara.

Situasi Pesantren Kombos di Manado relatif stabil, tidak terjebak dalam aksi radikal dan terorisme global. Pesantren Kombos tampil ke ruang public melalui kyai dan santri sehingga tidak mengalami deprivasi relatif, disorientasi, dislokasi, dan negativisme terhadap masyarakat sekitar. Motifnya tiada lain adalah untuk menjalin spirit persatuan dan kesatuan. Persatuan

dalam konteks ini adalah melihat kekayaan kultural sebagai suatu realitas; dan kesatuan mengacu pada politik pemerintahan (Abdillah 2015).

Memahami dinamika pendidikan Islam di Pesantren Kombos dapat ditelusuri melalui sepak terjangnya dalam merespon gelombang Islamisme melalui tiga gerakan utama yakni: gerakan ideologi politik, gerakan demografis-akomodatif, dan gerakan programatik-asosiatif (Rusli 2016).

### GERAKAN IDEOLOGI-POLITIK

Secara ideologi pesantren Kombos cenderung menganut paham '*torang samua basudra*' dan '*Si Tou Timou Tumou Tou*'. Ini tampak terutama saat peristiwa kerusuhan Poso pada tahun 2000. Atas peristiwa tersebut pimpinan pesantren Kombos (K.H. Rizali M. Noor) dengan sigap segera membangun komunikasi dengan berbagai elemen masyarakat dan pemerintah. Pesantren Kombos pada saat itu menjadi pusat dialog antara umat Islam dan Kristen di Manado. Komentar salah seorang alumni Pesantren Kombos menuturkan (Rahman Mantu, 2015):

“Setiap kali ada konflik antar agama baik itu di daerah lain maupun di Manado, K.H. Rizali M Noor (selaku pimpinan Pesantren Kombos) selalu mengambil momentum. Beliau menginisiasi untuk mengajak tokoh dan masyarakat non-Muslim berdialog, dan dialog itu diselenggarakan di Pesantren.”

Tindakan di atas menyiratkan bahwa dalam menyikapi arus Islamisme yang ingin menghantam keutuhan NKRI, ideologi yang digunakan pesantren Kombos bercorak *top down*, lalu nilai-nilai dalam ungkapan '*torang samua basudra*' (kita semua diciptakan Tuhan menjadi saudara) dan '*Si Tou Timou Tumou Tou*' (manusia hidup untuk memanusiaikan manusia lain) diinternalisasi secara *bottom-up*. Ini berimplikasi pada adanya sinergitas antara K.H. Rizali M. Noor dengan para santri dan masyarakat Manado yang sangat majemuk dan rawan konflik yang mengatasmakan ideologi keagamaan.

Peristiwa lainnya yang terjadi pada tahun 2010, saat K.H.



Rizali M. Noor mencalonkan diri sebagai calon wakil wali kota yang berpasangan dengan Louis Nangoy, S.H. (sebagai calon walikotanya) untuk periode 2010-2015, di mana masing-masing berangkat dari jalur independen. Tentu saja hal ini menimbulkan pro dan kontra. Kelompok kontra menganggap bahwa jika K.H. Rizali M. Noor terpilih, maka tatanan pendidikan pondok pesantren akan terbengkalai. Kelompok yang pro menganggap bahwa langkah K.H. Rizali M. Noor sudah tepat karena akan ada wakil Muslim yang membuat, menentukan, dan mengawal kebijakan-kebijakan pendidikan Islam dengan semangat toleran, moderat, inklusif, dan memberdayakan pluralitas. Fenomena ini menunjukkan kesadaran K.H. Rizali M. Noor sebagai pimpinan Pesantren Kombos untuk membangun tatanan jalur pendidikan Islam melalui jalur politik lokal di Manado. Gerakan ideologis-politis yang telah dilakukan pimpinan Pesantren Kombos ini menunjukkan bahwa jalur politik merupakan alat untuk menyukseskan penyelenggaraan pendidikan di Manado terutama pendidikan Islam.

#### *GERAKAN DEMOGRAFIS-AKOMODATIF*

Hal ini dilakukan Pesantren Kombos dengan mempelajari dinamika kependudukan seperti ukuran, kriteria, dan distribusi penduduk, serta menganalisis perubahan jumlah penduduk sebagai efek transmigrasi. Ini dilakukan untuk mengontrol peserta didik (santri) yang akan masuk ke lembaga pendidikan Islam (pesantren) tersebut. Berdasar hasil identifikasi ini pesantren Kombos melakukan seleksi cukup ketat dalam rangka memfilter tidak tersebarnya ideologi-ideologi Islam garis keras secara struktural, sistematis, dan massif. Pesantren Kombos hanya menerima santri laki-laki. Salah satu pertimbangannya adalah bahwa banyak dari pelaku tindakan radikalisme maupun terorisme adalah laki-laki.

Meski melakukan seleksi cukup ketat terhadap calon-calon santrinya, Pesantren Kombos juga mengakomodasi masyarakat lokal dan pendatang yang ingin masuk ke pesantren tersebut. Dalam konteks ini pesantren Kombos mengedepankan pola

hubungan sosial *horizontal-oriented*, yakni pola hubungan yang mengedepankan keharmonisan dengan sesama sebagai hal yang sangat penting dan berharga dalam hidup (Departemen Kebudayaan dan Pariwisata 2005). Kriesberg (dalam Tri Ratnawati 2015) memperkuat hal ini dengan menyatakan bahwa semakin tinggi tingkat interaksi dan saling ketergantungan antar sesama pihak yang berkonflik, semakin kecil peluang munculnya konflik baru di masyarakat.

#### *GERAKAN PROGRAM-ASOSIATIF*

Pesantren Kombos dalam hal ini melakukan konsolidasi dengan berbagai pihak yang mempunyai pengaruh kuat untuk memobilisasi massa, seperti dengan Kodim, Gubernur, lembaga-lembaga pendidikan formal (sekolah), polisi, tentara, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan media massa. Konsolidasi dengan Kodim 1309/Manado misalnya dilakukan dalam kegiatan sosialisasi radikalisme dan terorisme. Tidak cukup dengan Kodim, agar kegiatan ini betul-betul tersosialisasi ke seluruh lini, maka dilibatkan juga sekolah-sekolah. Dalam hal ini sosialisasi anti radikalisme dan terorisme dilakukan melalui kurikulum-kurikulum pendidikan, pengadaan training-training, dan kaderisasi. Demikian juga pengadaan seminar dan dialog tentang anti toleransi dengan menjadikan Gubernur Manado sebagai narasumber dan Gubernur menyampaikan bahwa media massa punya andil besar dalam mencegah anti toleransi. Selain itu Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) Sulawesi Utara diajak untuk bersinergi dengan pemerintah daerah (Almunauwar 2016).

Selain Pesantren, organisasi Islam tentu saja juga memiliki peran yang sangat signifikan dalam memberikan pendidikan kepada Muslim di wilayah minoritas. NU di Manado, misalnya, memiliki peran yang cukup urgen dan signifikan karena program-program kegiatan yang dilakukan NU selaras dengan program pemerintah yaitu menjaga keharmonisan hubungan antar umat beragama (Dondokambey 2018). Keharmonisan terealisasi sebagai hasil dari adanya pemahaman yang baik dari

masyarakat tentang pentingnya hidup dalam kebhinekaan di Sulawesi Utara. Salah satu yang dilakukan organisasi ini ialah jika umat agama lain menyelenggarakan kegiatan perayaan agama, Banom NU ikut ambil bagian dalam menjaga. Demikian pula sebaliknya, jika Muslim melakukan sebuah kegiatan, umat non-Muslim melakukan tindakan sebagaimana yang dilakukan oleh umat Islam (Mukafi 2017). Demikian juga Muhammadiyah. Setelah mengalami beberapa fase perkembangan, awal tahun 2000-an dan berlanjut hingga saat ini, peran organisasi ini di Manado terfokus pada upaya memediasi ketegangan yang berpotensi muncul disebabkan gesekan sosial, ekonomi, dan politik (Sandiah 2018).

Dari panggung anak muda, Pemuda Peduli Masjid mewakili gerak pemuda Muslim di Manado yang aktif dalam memakmurkan masjid dan juga mengemban tanggung jawab penyebaran Islam dan peneguhan rasa kebangsaan. Slogan mereka adalah cinta agama dan juga cinta NKRI. Mereka percaya bahwa mencintai agama sama halnya dengan mencintai negeri, dan karenanya membela Islam berarti harus memakmurkan masyarakat Indonesia (Boalemo 2017). Kedua tanggung jawab ini dimanifestasikan melalui kegiatan yang dilakukan oleh Pemuda Peduli Masjid seperti Program Pelatihan Pemuda Pelopor. Penyelenggaraan kegiatan tersebut merupakan upaya menjaga dan menjadikan aktivitas masjid bebas dari aktivitas penyebaran fitnah, kebencian, dan paham yang anti Pancasila atau intoleran (Setiawan 2017).

Beralih ke Ambon, kota ini bisa menjadi contoh dari upaya pemuka agama yang memainkan peranan penting dalam gerakan damai sampai kota ini menjadi kisah sukses dialog Muslim–Kristen di Indonesia dan menempati peringkat ke 5 sebagai kota paling toleran di Indonesia. Abidin Wakano dari komunitas Muslim dan pendeta Jacky Manuputty dari Krsiten adalah dua tokoh sentral yang menginisiasi dialog antar iman dan membuat gerakan provokator damai. Gerakan ini sudah menjadi gabungan dari berbagai organisasi lintas iman di kota Ambon dan kemudian dalam skala lebih besar menjadi

gerakan luas yang berbasis komunitas. Gerakan ini telah berhasil membangun kesadaran kolektif masyarakat untuk menciptakan perdamaian Muslim-Kristen yang terkoyak pada konflik berdarah 1999–2002 yang mengambil nyawa ribuan warga Ambon.

## KESIMPULAN

Sebagaimana dipaparkan di atas, penerimaan ulama di daerah Muslim minoritas terhadap konsep negara-bangsa beserta dimensinya cukup tinggi, bahkan lebih tinggi dibandingkan dengan ulama di wilayah mayoritas Muslim. Penerimaan ini bisa dijelaskan sebagai strategi *survival*, upaya memastikan bahwa keberadaan Muslim bisa diterima oleh kelompok dominan. Penerimaan itu bertujuan memberikan makna bahwa Muslim adalah warga negara dan warga lokal yang baik: mengakui Pancasila, mengakui otoritas pemimpin meski itu non-Muslim, serta menerima perbedaan dan menjaga toleransi.

Pendidikan yang diselenggarakan oleh organisasi Islam di wilayah-wilayah ini juga tampaknya diarahkan untuk membawa misi penerimaan dan survivalitas di atas, khususnya memfasilitasi relasi Muslim sebagai minoritas dengan kelompok dominan. Upaya tersebut dilakukan dengan negosiasi dan juga modifikasi yang dilakukan dalam aktivitas pendidikan Islamnya. Fenomena Kismuha (Kristen Muhammadiyah) di Kupang merupakan gambaran nyata dari negosiasi dan modifikasi tersebut. Kondisi-kondisi di atas menunjukkan bahwa ulama sanggup beradaptasi dengan konteks lokal untuk menjadi pengawal kebangsaan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah, Masykuri. 1999. *Demokrasi di Persimpangan: Makna Respons Intelektual Muslim Indonesia terhadap Konsep Demokrasi (1966-1993)*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Amin. Ali. 2017. "Revitalisasi Agama di SULUT (Kasus Studi Kelompok Aliran Syi'ah di Manado)." *Jurnal Potret: Jurnal Penelitian dan Pemikiran Islam* 21 (2): 14-28.
- Ardhana, I. Ketut. 2005. *Penataan Nusa Tenggara Pada Masa Kolonial 1915- 1950*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Azra, Azyumardi. 2006. *Islam in the Indonesian World: An Account of Institutional Formation*. Bandung: Mizan Pustaka.
- Badan Pusat Statistik Nusa Tenggara Timur. 2017.
- Boelaars, Huub J. W. M. (Dr. Huub J. W. M. Boelaars, OFM Cap.) 2005 [1991]. *Indonesianisasi, Dari Gereja Katolik Di Indonesia Menjadi Gereja Katolik Indonesia [Indonesianisasi, Het Omvormingsproces Van De Katholieke Kerk In Indonesië Tot De Indonesische Katholieke Kerk]*. Yogyakarta: Kanisius.
- Chaplin, Chris. 2018. "Salafi Islamic Piety as Civic activism: Wahdah Islamiyah and Differentiated Citizenship in Indonesia." *Citizenship Studies*. 22 (2): 35-48.
- Departemen Kebudayaan dan Pariwisata Direktorat Jenderal Nilai-Budaya, Seni dan Film. 2005. *Nilai Kepercayaan Masyarakat Tentang Ruang Tempat Tinggal Di Kota Manado*. Jakarta: Departemen Kebudayaan dan Pariwisata Direktorat Jenderal Nilai-Budaya, Seni Dan Film.
- Elliott, S. (ed.). 2016. "Indonesian Religions." *PHILTAR*. Diakses Tanggal 02-03-2019.
- Fox, James. J. 1981. "Sailing to Kupang." *Hemisphere*, 25 (6): 374-377.
- Goh, Robbie B. H. 2005. *Christianity in Southeast Asia*. Singapore: ISEAS.

- Gross, L. Max. 2016. *A Muslim Archipelago: Islam and Politics in Southeast Asia*. Washington, D.C.: National Defense Intelligence College.
- Hasan, Noorhaidi dan Anas Aijudin. 2019. "Islam dan Kekuasaan: Menakar Pandangan Ulama Surakarta terhadap Negara-Bangsa." dalam *Ulama Politik dan Narasi Kebangsaan Fragmentasi Otoritas Keagamaan di Kota-kota Indonesia*, diedit oleh Ibnu Burdah, Najib Kailani dan Munirul Ikhwan. Yogyakarta: PusPIDeP.
- Hasil Ketetapan Musyawarah Nasional XI. 2009. *Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia*. Jakarta 22-24.
- Heuken, Adolf. 2008. "Christianity in Pre-Colonial Indonesia." Dalam *A History of Christianity in Indonesia*, diedit oleh Jan Aritonang and Karel Steenbrink, 3-7. Leiden/Boston: Brill.
- Hosen, Nadirsyah. 2005. "Religion and the Indonesian Constitution: A Recent Debate". *Journal of Southeast Asian Studies* 36 (3): 419-40.
- Intan, Benyamin Fleming 2006. *"Public Religion" And the Pancasila-Based State of Indonesia: An Ethical and Sociological Analysis*. New York: Peter Lang.
- Ismail, Sirajuddin. 2008. "Peran Para Sultan dalam penyebaran Islam di Gorontalo." *Al-Qalam*. 11-14: 85-99.
- Kementerian Agama RI. 2016. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016.
- Latipah, Eva. 2019. "Keulamaan dan Sikap Kewargaan pada Masyarakat Minoritas Muslim di Kota Manado." dalam *Ulama Politik dan Narasi Kebangsaan: Fragmentasi Otoritas Keagamaan di Kota-kota Indonesia*, diedit oleh Ibnu Burdah, Najib Kailani dan Munirul Ikhwan. Yogyakarta: PusPIDeP.
- Maksuni, Nurun. 2007. *Pesantren dalam Wajah Islam Indonesia*. Nusyria Net.



- Mantu, Rahman. 2015. "Pesantren PKP Kombos: Studi Sosiologis terhadap Aktivitas Pesantren di Tengah Masyarakat Mayoritas Kristen Kota Manado." dalam *Pesantren dan Reproduksi Ulama*, diedit oleh Muhammad Murtadlo. Jakarta: Pusat Cendekia Muda.
- Marshall, Paul. 2018. "The Ambiguities of Religious Freedom in Indonesia." *The Review of Faith & International Affairs* 16 (1), 85-96.
- Maslow, Abraham. 1954. *Motivation and Personality*. New York: Harper.
- Noor, Nina Mariani 2019. "Mempertahankan NKRI: Persepsi dan Pandangan Ulama Ambon terhadap Negara-Bangsa." dalam *Ulama Politik dan Narasi Kebangsaan Fragmentasi Otoritas Keagamaan di Kota-kota Indonesia*, diedit oleh Ibnu Burdah, Najib Kailani dan Munirul Ikhwan. Yogyakarta: PusPIDeP.
- Quintan Wiktorowicz (ed.). 2012. *Gerakan Sosial Islam: Teori, Pendekatan, dan Studi Kasus*. Yogyakarta: Gading Publisher.
- Rasyid, Lisa Aisyah. 2016. "Relasi Al-Khairaat-NU di Manado Tahun 1960-1998 (Studi Historis-Sosiologis)." *Tesis Master*. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga.
- Ro'fah. 2019. "Perspektif Ulama Kupang tentang Negara-Bangsa: Politik Identitas dan Toleransi yang Terganggu." dalam *Ulama Politik dan Narasi Kebangsaan Fragmentasi Otoritas Keagamaan di Kota-kota Indonesia*, diedit oleh Ibnu Burdah, Najib Kailani dan Munirul Ikhwan. Yogyakarta: PusPIDeP.
- Rusli, Almunauwar Bin. 2016. "Gerakan pesantren Kombos di Manado dalam Merespons Arus Postnasionalisme." Paper dipresentasikan dalam *International Seminar: Contribution of Islamic Higher Education for Global Peace*. Semarang, Indonesia, 21-23 November 2016.
- Salma. 2017. "Metode dan Pengaplikasian Dakwah Islam di Lembaga Studi Islam Assalam Manado (SIAM) Provinsi

- Sulawesi Utara.” *Journal of Islam and Plurality (Aqlam)* 2 (2): 67-82.
- Seo, Myengkyo. 2013. *State Management of Religion in Indonesia*. London/New York: Routledge.
- Shah, Dian A. H. 2017. *Constitutions, Religion and Politics in Asia: Indonesia, Malaysia and Sri Lanka*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Sopian, Indra. 2015. Perkembangan BKPRMI (Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia) di Kota Bandung Tahun 1995-2011. *Skripsi*. Bandung: UIN Sunan Gunung Djati.
- Suhadi. 2019. “Identitas Muslim dan Negosiasi Kewargaan Lokal di Tengah Menguatnya Politik Kebudayaan Ajeg Bali.” dalam *Ulama Politik dan Narasi Kebangsaan Fragmentasi Otoritas Keagamaan di Kota-kota Indonesia*, diedit oleh Ibnu Burdah, Najib Kailani dan Munirul Ikhwan. Yogyakarta: PusPIDeP.
- Suleman, Franky. 2017. “Keberagaman Budaya dan Agama di Kota Manado.” *Jurnal Ilmiah Kajian Antropologi* 1 (1).
- Taufieq, Rosita dan Rukmina Gonibala. 2006. *Geliat Dakwah di Bumi Nyiur Melambai: Kajian Sosiologis dan Kiat-Kiat Mnajemen Pembinaan Majelis Taklim*. Depok: Berkah.
- Tempo 7 Mei 2018, Cetak Biru.
- Ustman, Ismail. 2017. Sarekat Islam (SI): Gerakan Pembaruan Politik Islam. *Jurnal Potret*.
- Wahidin, Ade. 2014. “Konsep Ulama Menurut Al-Quran (Studi Analitis Atas Surat Fathir Ayat 28).” *Al-Tadabbur: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir* 1 (1).
- Wekke, Ismail Suardi & Ambo Tang. 2016. “Kultur Pendidikan Islam Di Minoritas Muslim Inggris.” *Thaqaifiyyat* 17 (1): 70-83.

## SUMBER INTERNET

- <http://www.nu.or.id/post/read/83918/dua-tanggung-jawab-pemuda-masjid-indonesia>. Diakses tanggal 13 Februari 2019.
- <http://www.sulutprov.go.id/contents/lowongan/DATABASE%202016.pdf>, diakses tanggal 8 Februari 2019.
- <http://manado.tribunnews.com/2019/01/29/bkprmi-gelar-diskusi-dr-taufiq-pasiak-dan-pendeta-arther-wuwung-jadi-pembicara>. Diakses tanggal 14 Februari 2019.
- <https://manadokota.bps.go.id/statictable/2015/04/23/34/jumlah,penduduk-menurut-kecamatan-dan-agama-yang-dianut-di-kota-manado-2010.html>, diakses tanggal 8 Februari 2019.
- <https://Muslimobsession.com/pw-parmusi-sulut-akan-kirim-100-dai-pada-jambore-nasional-dai/>, diakses tanggal 15 Februari 2019.
- <http://jejakislam.net/155/>. Diakses tanggal 11 Februari 2019.
- <http://manado.tribunnews.com/2016/06/11/sejarah-masjid-tertua-di-manado-tempat-pertama-syiar-islam-di-tanah-minahasa>, diakses tanggal 8 Februari 2019.
- <https://beritamanado.com/mui-gelar-dialog-nasional-tokoh-lintas-agama-dan-deklarasi-Pemilu-damai/>, diakses tanggal 14 Februari 2019.
- <http://www.nu.orid-post/read/83137/manadi-kota-plural-penuh-kedamaian>. Diakses tanggal 11 Februari 2019.
- <https://parmusi.wordpress.com/2015/01/29/sejarah-persaudaraan-Muslimin-indonesia-parmusi/>. Diakses tanggal 16 Februari 2019.
- <http://manado.tribunnews.com/2018/01/29/bkprmi-bolsel-ikutpelatihan-provost-brigade-di-jakarta>. Diakses tanggal 14 Februari 2019.
- <https://Parmusi.or.id/desa-madani>. Diakses tanggal 15 Februari 2019.

<https://wahdah.or.id/penataran-seputar-ramadhan-wahdah-manado/>. Diakses tanggal 15 Februari 2019.

<https://wahdah.or.id/sejarah-berdiri-manhaj/>. Diakses tanggal 14 Februari 2019.

<https://www.facebook.com/dpdwahdahmanado/>. Diakses tanggal 14 Februari 2019.

[https://www.iccb.org/iccb/wp-content/pdfs/adulted/Healthcare\\_Curriculum/Curriculum&Resources/Context\\_Social\\_Studies/F.%20HC%20Context%20Social%20Studies%20Resource%20File/Maslow%27s%20Heirarchy%20of%20Needs.Pdf](https://www.iccb.org/iccb/wp-content/pdfs/adulted/Healthcare_Curriculum/Curriculum&Resources/Context_Social_Studies/F.%20HC%20Context%20Social%20Studies%20Resource%20File/Maslow%27s%20Heirarchy%20of%20Needs.Pdf)

<https://republika.co.id/berita/kolom/wacana/18/04/24/p7o9s4282-sejarah-baru-bkprmi-part1>. Diakses tanggal 14 Februari 2019.

<https://media.neliti.com/media/publications/83059-ID-sejarah-kampung-islam-di-kecamatan-tumin.pdf>. Diakses tanggal 8 Februari 2019.

<http://www.nu.or.id/post/read/83905/remaja-masjid-di-manado-siap-jadi-pelopor-benteng-kedaulatan-dan-pemakmuran-nkri>. Diakses tanggal 11 Februari 2019.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA